

SKRIPSI
ANALISIS PENEGAKAN HUKUM INDONESIA TENTANG KEJAHATAN
TRANSNASIONAL DALAM LINGKUP TRANSAKSI KEUANGAN
(STUDI KASUS SKANDAL *PANAMA PAPERS* TAHUN 2016)

Oleh :

MUHAMMAD SYAMMAKH DAFFA ALGHAZALI

1910112170

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM INTERNASIONAL (PK VI)



Pembimbing :

Prof. Dr. Zainul Daulay, S.H., M.H.

Dr. Syofirman Syofyan, S.H., M.H.

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2023

ABSTRAK

Dalam rangka mencapai cita-cita Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mana mensejahterakan rakyatnya, ketahanan di bidang ekonomi mempunyai peran yang signifikan. Namun peredaran uang gelap masih menghantui Indonesia dalam mewujudkan cita-citanya. Salah satu praktik yang merugikan Negara Indonesia adalah penggelapan pajak. Penggelapan pajak sejatinya tidak terpisahkan dengan tindak pidana pencucian uang, yang mana suatu kejahatan sophisticated yang memerlukan perlakuan khusus dalam menindaknya. Tidak jarang kejahatan pencucian uang dilakukan tidak hanya di yurisdiksi Indonesia, namun juga di yurisdiksi negara lain, hal tersebut menyebabkan kejahatan tindak pidana pencucian uang dalam beberapa kasus dianggap sebagai kejahatan transnasional. Pada tahun 2016 dunia digemparkan dengan skandal Panama Papers, yang merupakan skandal penggelapan pajak lepas pantai. Meskipun Indonesia telah memiliki beberapa peraturan mengenai pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Namun, pada praktiknya masih sulit menindak pelaku kejahatan tersebut. Oleh karena itu penelitian ini berfokus kepada dua hal. Pertama, bagaimana pengaturan hukum Indonesia tentang kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan hasil tindak pidana di bidang perpajakan? Kedua, bagaimana penegakan hukum Indonesia dalam menindak kejahatan transnasional dalam lingkup transaksi keuangan hasil tindak pidana di bidang perpajakan? Untuk menjawab fokus kajian, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif-empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif serta dianalisis melalui studi kepustakaan dan wawancara serta metode analisis yuridis-kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasannya meskipun Indonesia telah memiliki instrumen hukum terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang terkhusus hasil kejahatan di bidang perpajakan, namun terdapat celah hukum pada pengaturan *Special Purpose Vehicle* (SPV) serta belum kuatnya *Financial Intelligence Unit* (FIU) dalam hal penegakan hukum. Sehingga diperlukannya penataan pengaturan SPV agar tidak lagi menjadi celah bagi para pelaku kejahatan serta penguatan pada FIU dalam hal penegakan hukum.

Kata Kunci: *Kejahatan Transnasional, Tindak Pidana Pencucian Uang, Penggelapan Pajak.*